

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **”Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan Kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas PPS Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2020, Rencana Kinerja tahun 2020, dan Capaian Kinerja 2020. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, 08 Januari 2021

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus



Somantri
Ir. Soma Somantri M.E

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.388.011.000,- untuk Tahun 2020 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 12.106.817.973,- atau mencapai 97,73 persen s.d Triwulan IV Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan IV tahun 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar **108,56**



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan IV PPS Bungus

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan IV Tahun 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan IV Tahun 2020 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di hampir semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja TW IV Terlampir).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah di Identifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Program (SP) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus s/d Triwulan IV tahun 2020 dapat disajikan pada diagram dibawah ini, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d Triwulan IV pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

No	Nama Unit Kerja	TW1		TW2		TW3		TW4		Cascading
		NPSS	TUKIN K/O (Rp)							
1	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	112.15		114.34		126.65		108.56		Q
2	BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	115.65		108.08		110.52		111.42		Q
3	BIDANG TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	108.08		105.01		104.29		109.23		Q
4	BAGIAN TATA USAHA	108.63		101.24		131.03		104.76		Q
TW1	Untuk Pembayaran Tukin Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020									
TW2	Untuk Pembayaran Tukin Bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2020									
TW3	Untuk Pembayaran Tukin Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020									
TW4	Untuk Pembayaran Tukin Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2021									

Gambar 2. Dashboard Peta Strategis untuk Triwulan IV 2020 pada Aplikasi Kinerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.2.1. BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	4
1.2.2. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	5
1.2.3. SUB BAGIAN TATA USAHA.....	5
1.2.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	6
1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	7
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	10
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.3. PERMASALAHAN.....	16
2.4. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2020	16
2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2020	17
BAB III	20
AKUNTIBILITAS KINERJA	20
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.1.1. <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	23
SP-1 Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	23
3.1.2. <i>COSTUMER PERSPECTIVE (OUTPUT)</i>	25
SP-2 Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	25
SP-5 Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	28
1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPS Bungus	28
2. Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	31
3. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	31
4. Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi.....	34

Pada tabel 23 dapat dilihat bahwa persentase capaian IKU ini sebesar 50%. Persentase yang tidak maksimal ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi belum dapat dilaksanakan diakibatkan wabah Covid-19, tentang aturan pelarangan sosial berskala besar (PSBB) Data dukung tercapainya IKU ini adalah jumlah orang yang telah dilakukan sertifikasi SKPI awak kapal perikanan.	34
5. Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	36
Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	36
6. Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus	38
Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus	38
SP-3 Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
SP-4 Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab di PPS Bungus	43
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	43
Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan. Data dukung IKU ini adalah dengan diikutinya kegiatan koordinasi pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).	43
2. Jumlah Lembaga Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi	45
3.1.3. <i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)</i>	48
SS-6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	48
1. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	48
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .	50
3. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	53
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).....	53
4. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	55
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	60
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
4.1. KESIMPULAN.....	61
4.2. SARAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan IV PPS Bungus	ii
Gambar 2. Dashboard Peta Strategis untuk Triwulan IV 2020 pada Aplikasi Kinerja.....	iii
Gambar 3. Struktur Organisasi PPS Bungus Triwulan IV Tahun 2020	7
Gambar 4. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020	12

LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA KINERJA PPS BUNGUS TAHUN 2020.....	1
Lampiran 2 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi cascading/ Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020	16
Tabel 3. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC)	18
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus hasil BSC Tahun 2020	20
Tabel 5. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	23
Tabel 6. Perbandingan target Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap tahun 2020 dengan tahun sebelumnya	24
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	24
Tabel 8. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta)	25
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Nilai PNBPUPT PPS Bungus di Tahun 2020	26
Tabel 10. Rincian Nilai PNBPUPT PPS Bungus Tahun 2020 Per Bulan	26
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPUPT Tahun 2019 dengan Tahun 2020	27
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPUPT Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra	27
Tabel 13. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	28
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	29
Tabel 15. Rincian Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	29
Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	29
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah dalam Renstra (ton)	30
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Operasional PPS Bungus Tahun 2020	31
Tabel 19. Tingkat Operasional PPS Bungus yang Memenuhi Standar Tahun 2020	32
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Operasional PPS Bungus	32
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Operasional PPS Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra	33
Tabel 22. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	33
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	34
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	34
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang) dengan Target Menengah dalam Renstra	35
Tabel 26. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	35
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	36
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	36
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra	37
Tabel 30. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	37
Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus	38

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus	38
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra.....	39
Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	39
Tabel 35. Jumlah Kapal Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di PPS Bungus tahun 2020	41
Tabel 36.Perbandingan Realisasi Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	42
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra.....	42
Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	43
Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	44
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian IKU	44
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen) dengan Target Menengah dalam Renstra.....	44
Tabel 42. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	45
Tabel 43 Target dan realisasi IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP) 46	
Tabel 44. Perbandingan target IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi 2020 dengan tahun sebelumnya	46
Tabel 45 Perbandingan target IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi 2020 dengan Target Menengah.....	47
Tabel 46. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta).....	47
Tabel 47. Target dan Realisasi IKU Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).....	48
Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai) Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya	49
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai) dengan Target Menengah dalam Renstra.....	49
Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran	50
Tabel 51. Target dan realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	51
Tabel 52. Perbandingan target IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.....	51
Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra	52
Tabel 54. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta).....	52
Tabel 55. Target dan Realisasi IKU Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	53
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2019 dengan Tahun 2020.....	54
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra.....	54

Tabel 58. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	55
Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	57
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Tahun 2019 dengan Tahun 2020.....	58
Tabel 61. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra.....	58
Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	59
Tabel 63. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan s.d Triwulan IV	60
Tabel 64. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS).....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

PPS Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (Value Added) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja

yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2020 PPS Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2020 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama tahun 2020 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 dan Perjanjian Kinerja.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang

Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

a. Fungsi Pemerintahan

- Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- Pelaksanaan kesyahbandaran;
- Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawaskapal perikanan;
- Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- Pemantauan wilayah pesisir;
- Pengendalian lingkungan;
- Kepabeanan; dan/atau
- Keimigrasian.

b. Fungsi Perusahaan

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- Pelayanan bongkar muat ikan;
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran dan distribusi ikan;
- Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- Wisata bahari; dan/atau
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

1.2.1. BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

a. Tugas :

Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhan, kapal perikanan dan kesyahbandaran

b. Fungsi :

- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
- Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha

c. Seksi – Seksi dan Tugasnya :

Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran terdiri atas:

- Seksi Operasional Pelabuhan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB; dan
- Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat, Tanda Bukti Laporan, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan, Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan, pengisian bahan bakar, bimbingan teknis,

serta kegiatan, kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.2. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA

a. Tugas:

Melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.

b. Fungsi:

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

c. Seksi-Seksi dan Tugasnya :

- Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan.
- Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

1.2.3. SUB BAGIAN TATA USAHA

a. Tugas :

Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.

b. Fungsi:

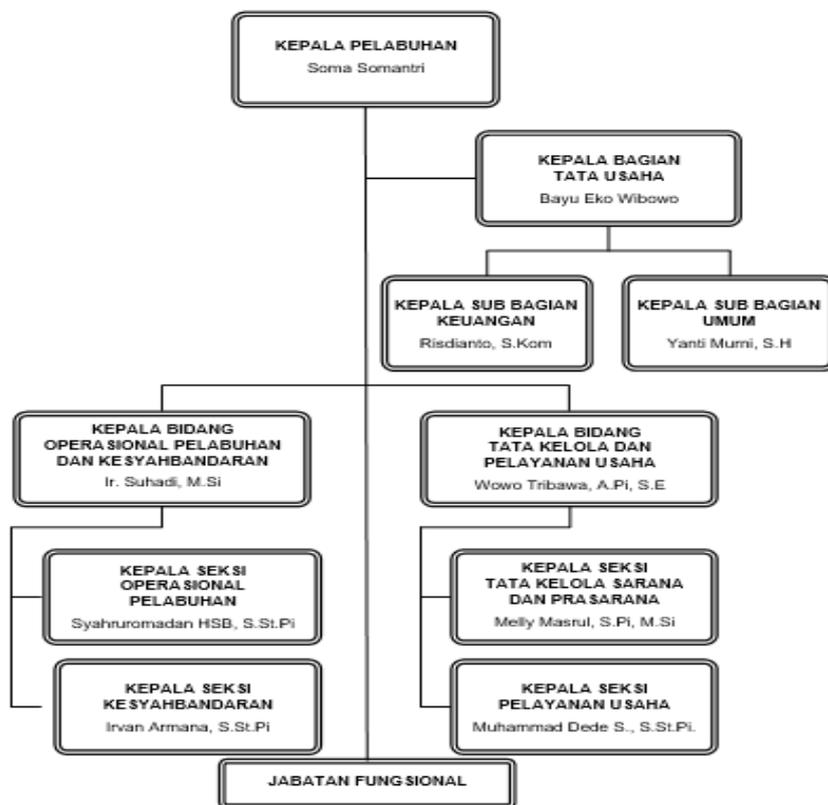
Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan pengendalian lingkungan, pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

c. Sub Bagian dan Tugas nya :

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- Subbagian Umum sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), pengelolaan Barang Milik Negara, rumah tangga, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

1.2.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



Gambar 3. Struktur Organisasi PPS Bungus Triwulan IV Tahun 2020

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama tahun 2020 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2020 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2020 sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab III Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab IV Akuntabilitas

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut “Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan

Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

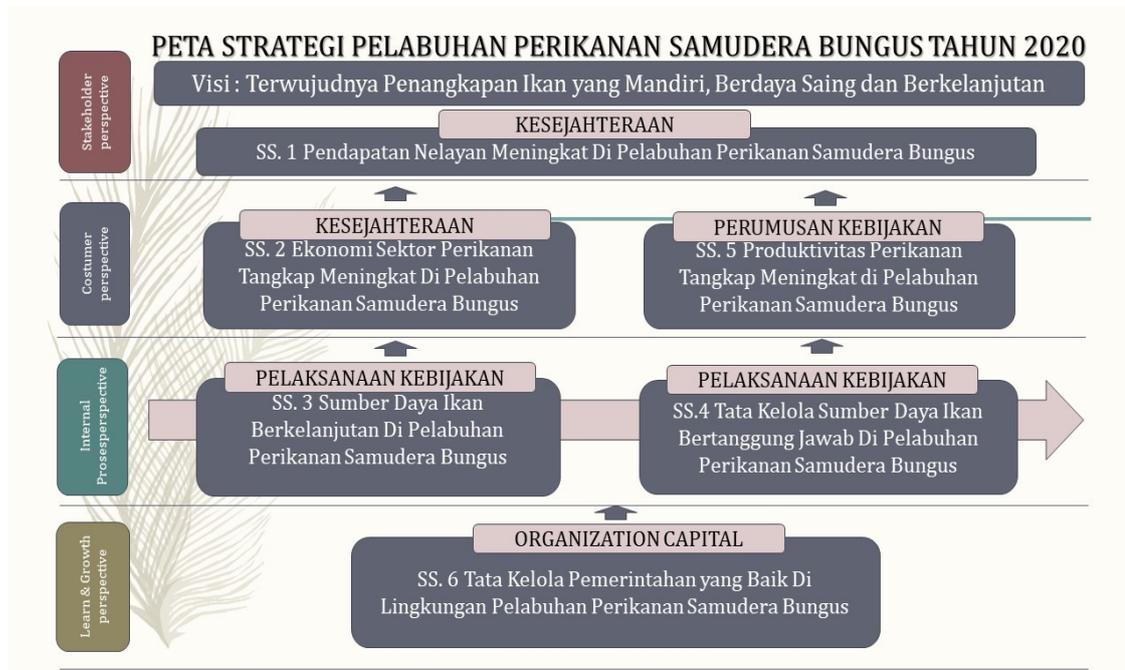
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan. Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan

nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 4. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020

Sasaran Program Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*

Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja berupa Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap.

2. *Customer Perspective* (Output)

3. Sasaran program kedua (SP-2) dan kelima (SP-5) yang akan dicapai adalah ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan produktivitas perikanan tangkap meningkat di

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-2);
- b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-5);
- c. Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-5);
- d. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-5);
- e. Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (SP-5);
- f. Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-5);
- g. Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-5).

4. *Internal Process Perspective (process)*

Sasaran program yang termasuk kedalam *Internal Process Perspective* adalah sasaran program ketiga (SP-3) yaitu sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan sasaran program keempat (SP-4) yaitu Tata kelola sumber daya ikan bertanggungjawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus , dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SP-3);
- b. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (SP-4);
- c. Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (SP-4).

5. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran program sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksanakannya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, yakni: Sasaran program keenam (SP-6) yang akan dicapai adalah tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- b. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- d. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level III Kepada Bawahan (Level IV), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Informasi cascading/ Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ CASCASCADING
Pendapatan Nelayan Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	50	Tahunan	IKU Baru	Bidang TKPU
Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBPN Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6	Bulanan	Komponen Pembentuk	Bidang TKPU
Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Unit)	120	Bulanan	Lingkup Dipersempit	Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (Persen)	100	Tahunan	Tidak Diturunkan	-
	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (WPP)	1	Tahunan	Komponen Pembentuk	Bagian Tata Usaha
Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	3.500	Bulanan	Komponen Pembentuk	Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1	Tahunan	Adopsi Langsung	Bidang TKPU

	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	Bulanan	Adopsi Langsung	Semua Bidang
	Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)	32	Tahunan	IKU Baru	Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1	Tahunan	IKU Baru	Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
	Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	100	Tahunan	Tidak Diturunkan	Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	Tahunan	IKU Baru	Semua Bidang
	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72	Tahunan	Lingkup Dipersempit	Semua Bidang
	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85	Tahunan	Lingkup Dipersempit	Semua Bidang
	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88	Triwulanan	Lingkup Dipersempit	Bagian Tata Usaha

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

2.3. PERMASALAHAN

Dalam upaya mendukung agar suksesnya program pembangunan perikanan tangkap, PPS Bungus menghadapi berbagai permasalahan yang timbul baik di internal maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar. Adapun yang menjadi masalah adalah dimana PPS Bungus mengalami kendala dalam melakukan perawatan terhadap sarpras yang telah dibangun. Hal tersebut dikarenakan anggaran perawatan bernilai dibawah angka Rp.100.000.000 sehingga tidak muncul di aplikasi RKBMN.

2.4. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2020

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2020 (Rp)
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	11.750.150.000
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Terselenggaranya Tata Kelola pemanfaatan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	37.000.000
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang profesional dan partisipatif	1.115.000.000
Pengelolaan Perizinan dan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha	34.000.000

Kenelayanan	perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	
Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan	263.476.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Terkelolanya anggaran pembangunan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara efisien dan akuntabel.	10.300.674.000

2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2020

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024. Sasaran Program (SP) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus pada tahun 2020, untuk semua Sasaran Program berjumlah 6 SP dan 15 Indikator Kinerja (IK).

Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrument yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 yang disusun pada awal tahun 2020 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard (BSC)*

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	50
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2	Nilai PNBPN Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6
3.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Unit)	120
4.	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (Persen)	100
		5	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (WPP)	1
5.	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	3.500
		7	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		8	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		9	Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang	32

			Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)	
		10	Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		11	Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88

BAB III
AKUNTIBILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4 .Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus hasil BSC Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET (TRIWULAN)				REALISASI (TRIWULAN)				% Capaian Tahunan
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	50	-	-	-	50	-	-	-	50	100
Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780.60	250	250	250	250	516,40	288,80	268,46	263,55	171,30
Sumber Daya Ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (unit)	120	30	30	30	30	610	565	659	643	2.477
Tata Kelola Sumber Daya Ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	100

	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100
Produktivitas perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	3,500	800	800	950	950	804,6	1.432	1.452	1.087	136,5
	Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100
	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	75	75	75	75	75	76,91	75,70	82,16	82,16	136,5
	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	32	20	-	12	-	68	-	25	6	309,37
	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100
	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat-daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	-	-	-	100	-	-	-	100	100
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan	Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,10	-	-	-	45,10	-	-	-	66,75	148,00

Perikanan Samudera Bungus	Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	72	-	-	-	72	-	-	-	59,99	83,31
	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	85	-	-	-	85	-	-	-	93,53	110
	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	85	88	88	88	88	98,79	95,22	98,62	99,34	112,88

Pembahasan masing – masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi indikator triwulan I dan II dan III tahun 2020 terhadap target capaian Triwulan IV tahun 2020;
2. Membandingkan realisasi indikator tahun 2020 terhadap target tahun 2020;
3. Membandingkan realisasi indikator tahun 2020 terhadap target indikator tahun 2020 yang merupakan awal RPJMN dan tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPS/Kepala Bappenas);
4. Membandingkan realisasi indikator tahun 2020 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPS Bungus terhadap capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan capaian nasional;
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2020 berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator (lampiran);
6. Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator tahun 2020 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL). Analisa ini terbatas pada internal process perspective dan learning and growth perspective dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni

stakeholder perspective dan customer perspective merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;

7. Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tahun 2020.

3.1.1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SP-1 Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 indikator yaitu Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap. Indikator ini merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk *stakeholder* yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan di pojok nelayan. Target kegiatan tahun 2020 sebesar 50 Nelayan dan sudah terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2020.

1. Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Capaian IKU ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

a. Target dan Realisasi

Tabel 5. Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	50	50	100

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa target indikator kinerja jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap sebesar 50 orang untuk tahun 2020 dan sudah terealisasi sebanyak 50 orang. Dengan demikian realisasi capaian indikator kinerja ini sebesar 100%. Capaian ini didukung dengan adanya fasilitas permodalan perikanan tangkap melalui pojok pendanaan usaha perikanan tangkap.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelum

Tabel 6. Perbandingan Target Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	
	2019	2020
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	-	50

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi tahun 2020 terhadap capaian tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini baru di tahun 2020.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (Nelayan)	50	50	100

Capaian angka indikator kinerja jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap merupakan IKU baru untuk tahun 2020. Dengan target IKU tahun 2020 sebanyak 50 orang dan target menengah dalam renstra tahun 2022 sebanyak 50 orang. Sehingga perbandingan realisasi Capaian Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap mencapai 100%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian IKU jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap ada beberapa kegiatan adalah telah berjalan dengan optimal fasilitasi pojok pendanaan kredit usaha nelayan yang ada di PPS Bungus.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 8. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta)

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
4.000.000	3.000.000	75

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa besar Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 4 juta rupiah dan terealisasi sebesar Rp.3 juta rupiah, dengan demikian target anggaran tahun 2020 sudah mencapai 75%. Adapun efisiensi dari penggunaan anggaran pada IKU ini sebesar Rp. 1 juta rupiah atau sama dengan 25%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang Kinerja

Komponen kegiatan yang menunjang tercapainya nilai IKU ini adalah fasilitas akses pendanaan usaha nelayan melalui Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).

3.1.2. COSTUMER PERSPECTIVE (OUTPUT)

SP-2 Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran program pertama (SP-2) yang akan dicapai adalah Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui sebuah indikator yaitu Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

1. Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPS Bungus (Rp. Juta)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

a. Target dan realisasi

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Nilai PNBPUPT PPS Bungus di Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian (juta)
Nilai PNBPUPT PPS Bungus	250	263,55	105,42

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator kinerja ini mencapai 105,42%. Realisasi indikator ini meliputi realisasi penerimaan atas pelayanan jasa yang telah diberikan oleh PPS Bungus terhadap stakeholder, sebagaimana sesuai dengan tarif pelayanan yang tercantum dalam PP 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas PNBPU yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerimaan tersebut disetorkan setiap harinya oleh petugas pelayanan jasa kepada bendahara penerimaan untuk kemudian disetorkan kembali kepada Negara dan diakumulasikan setiap bulan.

Tabel 10. Rincian Nilai PNBPUPT PPS Bungus Tahun 2020 Per Bulan

No	Bulan	Realisasi PNBPUPT PPS (Rp.)
1	Januari	93.134.919,-
2	Februari	254.259.761,-
3	Maret	169.006.234,-
4	April	108.723.999,-
5	Mei	66.070.322,-
6	Juni	114.015.572,-
7	Juli	90.313.634,-
8	Agustus	69.164.796,-
9	September	109.008.104,-
10	Oktober	50.279.254,-
11	November	139.252.691,-
12	Desember	74.025.477,-
Total		1.337.254.763,-

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa realisasi indikator pada Triwulan IV tahun 2020 sudah mencapai target penerimaan PNBP dengan persentase capaian sebesar 171,30% dari target penerimaan secara keseluruhan pada Triwulan IV. Fasilitas *Coldstorage* menjadi sumbangsih terbesar terhadap realisasi PNBP Tahun 2020. Hal ini dikarenakan industri pembekuan ikan semakin digemari oleh masyarakat Kota Padang. Tercapainya target ini tentu tak lepas dari komitmen semua petugas dalam melakukan tugas dan melaporkan secara rutin setiap bulan.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBP Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	113	250	113,74	263,55	+ 4,765

Perbandingan realisasi nilai PNBP 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,765%. Faktor yang mempengaruhi kenaikan ini adalah adanya peningkatan fasilitas *cold storage* PPS Bungus. Selain itu pembekuan ikan yang semakin digemari oleh masyarakat Kota Padang. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan jasa layanan pabrik es.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBP Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PPS Bungus (Rp. Juta)	263,55	1000	26,35

Apabila dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2020 sudah mencapai 26,35%. Hal ini disebabkan karena masih perlunya pengoptimalan pelayanan yang berbasis pada PNBP di PPS Bungus.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian nilai PNBPN Tahun 2020 dikarenakan adanya peningkatan kualitas dari es yang dihasilkan *cold storage*. Yang berdampak pada meningkatnya penggunaan jasa layanan *cold storage*. Selain itu juga semakin optimalnya pelaksanaan jasa pelayanan dan pemungutan PNBPN dengan adanya dukungan terhadap pelaksanaan dan manajemen PNBPN PPS Bungus.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 13. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
17.520.000	17.370.000	99,14

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU nilai PNBPN di PPS Bungus sebesar 99,14% dengan efisiensi sebesar 0,86%, yakni sebesar Rp. 150.000,-.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja

Komponen kegiatan yang menunjang tercapainya nilai PNBPN di PPS Bungus pada Triwulan III adalah Manajemen PNBPN SDA perikanan dan imbal jasa pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian PNBPN pelayanan jasa melalui koordinasi dengan instansi terkait dan rapat evaluasi capaian PNBPN.

SP-5 Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran program pertama (SP-2) yang akan dicapai adalah Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui sebuah indikator yaitu terdiri dari 6 (enam) Indikator yaitu :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPS Bungus

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap UPT PPS Bungus merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan melalui

coldstorage dan yang didaratkan melalui laut di PPS Bungus. Komposisi capaian produksi perikanan tangkap ini adalah dari produksi perikanan tangkap diperairan laut dan mum.

a. Target dan Realisasi

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	950	1.087	114,42

Adapun jumlah produksi perikanan tangkap psi PPS Bungus tahun 2020 per bulan sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)

No	Bulan	Jumlah Produksi (Ton) /Akumulasi
1	Januari	315.587
2	Februari	258.058
3	Maret	230.982
4	April	457.122
5	Mei	482.895
6	Juni	492.125
7	Juli	443.771
8	Agustus	507.738
9	September	500.801
10	Oktober	281.174
11	November	455.526
12	Desember	350.361
Total		4.776.140

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode yang sama

Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	980	950	4124	1087	- 306,4

Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 1087 ton jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 4124 ton terdapat penurunan sebesar 306,4%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan aktivitas akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga penurunan aktivitas ini berdampak pada hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPS Bungus.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah dalam Renstra (Ton)

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	% Capaian
Jumlah Produksi Perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	1087	4769	22,8

Persentase perbandingan capaian tahun 2020 sebesar 1087 ton dengan target tahun menengah sebesar 4769 ton (Renstra) sebesar 22,8%. Hal ini disebabkan karena cuaca buruk yang berdampak pada banyaknya nelayan yang tidak melaut untuk menghindari potensi keselamatan dan keamanan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap di Tahun 2020 dikarenakan tahun 2020 dipengaruhi oleh bertambah baiknya kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap yang ada di wilayah pelabuhan. Selain itu juga adanya timbangan online membantu kegiatan pendataan ikan di wilayah pelabuhan dengan meminimalkan data yang tidak tercatat.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tidak terdapat anggaran untuk mendukung IKU ini.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen Penilaian kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera dengan kegiatan pendataan ikan di wilayah pelabuhan dan Komponen penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data perikanan tangkap dengan kegiatan validasi dan sinkronisasi data perikanan tangkap.

h. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen Penilaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan operasional di Pelabuhan perikanan Samudera dan Penilaian Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera.

2. Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator yang menunjukkan jumlah pengembangan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Target untuk tahun 2020 sudah tercapai pada bulan April 2020/Triwulan I. Dengan demikian persentase capaian Indikator Kinerja ini sudah tercapai 100%.

3. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator tingkat operasional di UPT PPS Bungus yang memenuhi standar merupakan persentase jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang tersedia.

a. Target dan realisasi

Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data operasional pelabuhan dengan indikator data sebanyak 28 Jenis data yang harus di input setiap bulannya melalui aplikasi PIPP. Target dan Realisasi yang di tampilkan adalah data untuk Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Tingkat Operasional PPS Bungus Tahun 2020

Nama Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase dari Target Triwulan (%)
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	75	82,16	109,5

Dari tabel 18 dapat dilihat bahwa persentase realisasi IKU Tingkat Operasional PPS Bungus Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 109,5% dengan target sebesar 75% dan terealisasi

sebesar 82,16%. Pencapaian realisasi tingkat operasional ini dipengaruhi oleh evkin sebagai data dukung indikator kinerja ini bersifat dinamis, ketika terdapat update data terbaru maka akan mempengaruhi capaian kinerja triwulan maupun tahunan.

Rincian capaian nilai evaluasi kinerja Tahun 2020 yang diambil dari Aplikasi PIPP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19. Tingkat Operasional PPS Bungus yang Memenuhi Standar Tahun 2020

No	Bulan	Evaluasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan	
		Target	Nilai
1	Januari	72	77
2	Februari	72	77,5
3	Maret	72	76,25
4	April	75	76,25
5	Mei	75	73
6	Juni	75	74,25
7	Juli	75	80,5
8	Agustus	75	83
9	September	75	83
10	Oktober	75	78,5
11	November	75	84
12	Desember	75	84

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Operasional PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Tingkat Operasional PPS Bungus (persen)	80	75	80	82,16	+ 9,5

Perbandingan realisasi Tingkat Operasional di UPT PPS Bungus 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,5% ditahun 2020 Faktor yang mempengaruhi kenaikan ini adalah telah optimalnya pelaksanaan operasional dan pelayanan jasa di PPS Bungus. Selain itu juga, ketepatan waktu petugas dalam penyampaian data dan informasi ke dalam aplikasi PIPP.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Operasional PPS Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Tingkat Operasional PPS Bungus (persen)	82,16	80	102,66

Apabila dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2020 sudah mencapai 102,66%. Hal ini dikarenakan nilai evkin yang dijadikan sebagai data dukung bersifat dinamis sehingga apabila terdapat update data akan mempengaruhi capaian evkin.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Secara umum nilai evkin selama Tahun 2020 adalah BAIK, namun masih tetap dibawah target senilai 80 yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan nilai evaluasi kinerja bersifat dinamis akan berpengaruh pada capaian apabila terdapat update.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 22. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
578.100.000	489.366.789	84,65

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU Tingkat Operasional PPS Bungus sebesar 84,65% dengan efisiensi sebesar 15,35%, yakni sebesar Rp. **88.733.211**

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen Penilaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan operasional di Pelabuhan perikanan Samudera dan Penilaian Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera.

4. Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi

Indikator ini menunjukkan Jumlah ABK yang mengikuti Sosialisasi Pengawakan Kapal Perikanan. Kegiatan ini diturunkan ke eselon III dan IV terkait yang menangani awak kapal perikanan dengan nama IKU menjadi Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan dan dilaporkan secara triwulan dan Jumlah Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi

a. Target dan realisasi

Berdasarkan Keahlian dan Keterampilan yang dilaporkan secara Tahunan. Pada Triwulan IV yang sudah terealisasi adalah adanya tambahan capaian IKU pada Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebanyak 6 Orang. Adapun rincian pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 23 Target Dan Realisasi IKU Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)

Nama Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi (orang)	12	6	50

Pada tabel 23 dapat dilihat bahwa persentase capaian IKU ini sebesar 50%. Persentase yang tidak maksimal ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi belum dapat dilaksanakan diakibatkan wabah Covid-19, tentang aturan pelarangan sosial berskala besar (PSBB) Data dukung tercapainya IKU ini adalah jumlah orang yang telah dilakukan sertifikasi SKPI awak kapal perikanan.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	12	12	55	6	-408,33

Perbandingan realisasi nilai PNBPN 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 408,33%. Faktor yang mempengaruhi penurunan ini adalah adanya wabah Covid-19 yang

menyebabkan penurunan aktivitas yang melibatkan orang banyak, sehingga sosialisasi belum dapat dilakukan dengan optimal.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang) dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	6	32	18,75

Apabila dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2020 sudah mencapai 18,75%. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di PPS Bungus apabila jumlah awak kapal yang tersertifikasi sebanyak 12 orang. Pelaksanaan sertifikasi belum dapat dilaksanakan diakibatkan wabah covid19, tentang aturan pelarangan sosial berskala besar (PSBB).

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 26. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
7.000.000	6.985.800	99,80

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang) sebesar 99,80% dengan efisiensi sebesar 0,2%, yakni sebesar Rp. 14.200,-.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen pendukung capaian kinerja ini adalah dengan adanya pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan.

5. Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Penghitungan capaian IKU ini berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan pemantauan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional yang dipersyaratkan.

a. Target dan realisasi

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	2020	
Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	1	100

Target realisasi IKU permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan adalah 1 lokasi. Realisasi IKU ini telah tercapai pada tahun 2020. IKU ini merupakan IKU baru untuk tahun 2020. Data dukung tercapainya IKU ini dengan jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan /Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	-	1	-	1	-

Realisasi Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di PPS Bungus tahun 2020 sebanyak 1 Lokasi jika dibandingkan dengan capaian pada

tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan karena merupakan IKU baru yang tidak ada pada tahun sebelumnya.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	1	100

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2020 dengan target menengah dalam Renstra sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan permesinan kapal perikanan dilakukan dalam 1 wilayah provinsi, dimana PPS Bungus berada di Provinsi Sumatera Barat.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan tercapainya IKU permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan ditentukan dengan adanya pemantauan permesinan 46 kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional dibandingkan dengan aspek operasional yang dipersyaratkan.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 30. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
15.000.000	14.717.200	98,11

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 15.000.000. Tahun 2020 sudah terserapan pelaksanaan kegiatan dan telah mencapai 98,11%. Sementara nilai efisiensinya sebesar 1,89%, yakni sebesar Rp. 282.800.

g. Analisa Program /Kegiatan Yang Menunjang Kinerja

Kegiatan yang menunjang permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan adalah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan. Dimana output dari pelaksanaan adalah sosialisasi permesinan kapal perikanan yang memenuhi standar keselamatan dan operasional.

6. Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus

Merupakan presentase kegiatan penyampaian informasi terkait proses perizinan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dari stakeholder maupun dari instansi terkait dengan data dukung berupa kegiatan supervisi dan evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

a. Target dan realisasi

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, target IKU Tahun 2020 yakni 100%. Dimana pelaksanaan supervisi dan evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah terlaksana keseluruhan. Kegiatan ini memiliki output kegiatan berupa pelaksanaan harmonisasi dan integrasi perizinan pusat dan daerah, Evaluasi perizinan pusat dan daerah serta sosialisasi perizinan pusat-daerah yang dilaksanakan di PPS Bungus.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus (persen)	100	100	100	100	-

Perbandingan realisasi nilai PNBPN 2019 dan 2020 mengalami kondisi stabil, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah karena adanya COVID-19 sehingga tidak dapat dilakukan upaya maksimal karena kondisi PSBB.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah PPS Bungus (persen)	100	100	100

Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah PPS Bungus Jika dibandingkan antara capaian tahun 2020 dengan target menengah dalam Renstra sebesar 100%. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan bersifat outcome.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah diukur terlaksananya harmonisasi dan integrasi perizinan pusat dan daerah, evaluasi perizinan pusat dan daerah serta sosialisasi tentang perizinan. Adanya perubahan output kegiatan menjadi supervise dan evaluasi terkait perizinan daerah dimana kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun ini.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
30.000.000	27.941.800	93,14

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU ini teralokasi sebesar 93,14% dengan efisiensi sebesar 6,86%, yakni sebesar Rp. 2.058.200.

g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU penyampaian informasi perizinan pusat – daerah ini adalah supervisi dan evaluasi pengelolaan perizinan pusat dan daerah terlaksana keseluruhan. Kegiatan ini memiliki output kegiatan berupa pelaksanaan harmonisasi dan integrasi perizinan pusat dan daerah, evaluasi perizinan pusat dan daerah serta sosialisasi perizinan pusat-daerah yang dilaksanakan di PPS Bungus.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (PROCESS)

SP-3 Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah “Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui sebuah Indikator Kinerja yaitu jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator ini merupakan ukuran jumlah unit kapal yang mengisi dan melaporkan logbook penangkapan. Target dan Realisasi untuk tahun 2020 dapat dilihat pada di bawah ini:

1. Jumlah Kapal Perikanan Yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan yang ditunjukkan dari data unit kapal yang menyerahkan logbook penangkapan ikan manual dan e-logbook penangkapan ikan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 35. Jumlah Kapal Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di PPS Bungus tahun 2020

Nama Indikator Kinerja	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian
Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	30	643	2.143,3
Rincian Capaian Logbook Perikanan			
Bulan/Tahun	PPS Bungus (Unit)	Pelabuhan Binaan (Unit)	
Januari	130	75	
Februari	129	58	
Maret	135	83	
April	104	75	
Mei	103	73	
Juni	132	78	
Juli	115	78	
Agustus	117	79	
September	186	84	
Oktober	154	78	
November	122	94	
Desember	112	83	
Total	2.477 Unit		

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dihitung jumlah capaian Logbook Penangkapan Ikan pada Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak **643 Unit**, dengan demikian total capaian Logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan IV Tahun 2020 sebesar **2.143,3%**. Capaian ini dikarenakan telah optimalnya pelaksanaan pelayanan logbook penangkapan ikan di PPS Bungus. Dan dukungan pelaku usaha perikanan tangkap yang aktif melaporkan hasil logbook penangkapan ikan ke petugas kesyahbandaran serta rajin dalam mengurus perpanjangan ijin penangkapan kapal perikanan. Perhitungan unit kapal ini tidak berulang di setiap bulan.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	30	-	643	-

Tidak dapat dibandingkan antara capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2019 dikarenakan indikator kinerja ini merupakan indikator baru untuk tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	643	150	428,67

Apabila dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2020 sudah mencapai 428,67%. Hal ini disebabkan karena upaya optimalisasi pelayanan dalam pembuatan logbook penangkapan ikan PPS Bungus, serta didukung oleh pelaku usaha perikanan tangkap yang aktif melaporkan hasil logbook.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian jumlah kapal yang menerapkan logbook penangkapan ikan tak lepas dari peran petugas kesyahbandaran dalam melakukan pelayanan, sehingga pelaku usaha perikanan tangkap secara aktif melaporkan logbook penangkapan ikannya. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah kapal yang melakukan aktivitas bongkar di PPS Bungus yang berdokumen kapal lengkap dan aktif.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
227.482.000	222.955.100	98,01

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 98,01% dengan efisiensi sebesar 1,99%, yakni sebesar Rp. 4.526.900.

g. Analisa Program /kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja penerapan logbook penangkapan ikan di PPS Bungus adalah pelaksanaan dan pengumpulan data logbook penangkapan ikan.

SP-4 Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab di PPS Bungus

Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui sebuah indikator yaitu terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan. Data dukung IKU ini adalah dengan diikutinya kegiatan koordinasi pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

a. Target dan realisasi

Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	2020	
Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian IKU ini mencapai 100% dengan target 2020 sebanyak 100% dan realisasi 2020 mencapai 100%. Capaian ini dipengaruhi oleh kinerja dan pelayanan PPS Bungus dalam melayani dan memfasilitasi para nelayan.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (Persen)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
	2019	2020	2019	2020	Kenaikan/Penurunan
Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	-	100	-	100	-

Perbandingan dengan tahun 2019 tidak dapat dilakukan karena IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2020.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (Persen) dengan Target Menengah Dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100

Persentase perbandingan realisasi IKU ini dengan target menengah dalam renstra sudah mencapai 100%. Capaian ini dipengaruhi oleh kinerja dan pelayanan PPS Bungus dalam melayani dan memfasilitasi para nelayan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi IKU ini adalah tercapainya realisasi pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan terhadap rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan yang dipersyaratkan. Rencana aksi tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam pertemuan LPP-WPP 712 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 42. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
5.994.000	5.230.000	87,25

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar 87,25% dengan efisiensi sebesar **12,75%**, yakni sebesar Rp. **764.000**.

g. Analisa Program /kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah evaluasi rencana pengelolaan perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertemuan dalam rangka evaluasi rencana pengelolaan perikanan WPP 712.

2. Jumlah Lembaga Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi

Indikator Kinerja ini memiliki output Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dengan komponen operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI

a. Target dan Realisasi

Tabel 43 Target dan realisasi IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	2020	
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP)	1	1	100

Pada tabel 40 di atas dapat terlihat bahwa target indikator kinerja ini 1 WPP dengan realisasi 1 WPP yang berarti mencapai 100%. IKU ini merupakan IKU tahunan dan sudah tercapai pada triwulan IV. Capaian ini didukung dengan kinerja PPS Bungus dalam melakukan optimalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 Pada Periode Sebelumnya

Tabel 44. Perbandingan target IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Beroperasi 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	1	1	1	1	100

Pada tabel 44 dapat dilihat bahwa persentase perbandingan capaian IKU ini pada tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah 100% yang berarti konstan, tidak ada kenaikan maupun penurunan capaian realisasi.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 45 Perbandingan target IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi 2020 dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP)	1	1	100

Pada tabel 45 terlihat bahwa perbandingan realisasi IKU Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi mencapai 100%, dengan capaian tahun 2020 satu WPP dan target menengah dalam renstra 2022 satu WPP.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian ini didukung dengan kinerja PPS Bungus dalam melakukan optimalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 46. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta)

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
30.000.000	25.410.210	84,70

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa besar Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.410.210 dengan demikian target anggaran tahun 2020 sudah mencapai 84,70%. Adapun efisiensi dari penggunaan anggaran pada IKU ini sebesar Rp. **4.589.790** atau sama dengan 15,30%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang Kinerja

Komponen kegiatan yang menunjang tercapainya Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi adalah operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.

3.1.3. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)

SS-6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran program ke-enam (SP-6) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui sebuah indikator yaitu terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 dan mencapai nilai 45,10 bagi Satuan Kerja yang belum atau akan dicanangkan menuju WBK.

a. Target dan realisasi

Tabel 47. Target Dan Realisasi IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	2020	2020	
Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,10	66,75	148,00

Pada tabel 47 terlihat bahwa capaian IKU ini mencapai 148% dengan target nilai 45,10 dan realisasi nilai sebesar 66,75. Hal ini didukung penerapan reformasi birokrasi di PPS Bungus serta dalam pengumpulan dan melengkapi segala dokumen keperluan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di PPS Bungus.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode sebelumnya

Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai) Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Pada Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan /Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	-	45,10	-	66,75	-

Tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena IKU Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai) merupakan IKU baru di PPS Bungus tahun 2020

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai) Dengan Target Menengah Dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	66,75	75	89

Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus Jika dibandingkan antara capaian tahun 2020 dengan target menengah dalam Renstra sebesar 89%. Ini dikarenakan IKU WBK ini baru dilaksanakan pada tahun 2020.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan dokumen reformasi birokrasi di PPS Bungus melalui kegiatan penerapan dan pengumpulan data pembangunan zona integritas menuju WBK di PPS Bungus.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
55.000.000	32.835.500	59,70

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU WBK ini sebesar 59,70% dengan efisiensi sebesar 34,48% yakni sebesar Rp.18.966.000.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang merupakan kegiatan dukungan penerapan Reformasi Birokrasi adalah kegiatan yang menunjang kinerja tersebut.

2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup PPS Bungus merupakan ukuran atau nilai hasil pengintegrasian antara kompetensi dengan integritas yang dimiliki oleh seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas – tugasnya. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni :

- Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
- Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi : Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

a. Target dan Realisasi

Tabel 51. Target dan realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	2020	2020	Capaian
Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	72	59,99	83.31

Pada tabel 48 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja ini sebesar 83,31%. Hal ini disebabkan karena Sebagian besar pegawai di PPS Bungus telah terfasilitasi dalam mengikuti diklat maupun pengembangan pegawai seperti seminar yang Sebagian besar dilakukan online pada tahun ini. Masih rendahnya keikutsertaan didalam diklat dan seminar serta dengan komposisi sebagian besar pegawai PPS Bungus memiliki kualifikasi pendidikan SMA menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya nilai IP ASN tersebut.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 Pada Periode yang sama

Tabel 52. Perbandingan target IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
	2019	2020	2019	2020	Kenaikan/ Penurunan
Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	71	72	74,52	59,99	-21,65

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi tahun 2020 terhadap capaian tahun 2019 pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 21,65%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketersediaan diklat secara offline berkurang. Selanjutnya, masih banyak pegawai PPS Bungus yang belum terbiasa dengan diklat ataupun bentuk pengembangan kompetensi secara online.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	59,99	72	83,31

Capaian angka indikator kinerja jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap merupakan IKU baru untuk tahun 2020. Dengan capaian IKU tahun 2020 sebesar 59,99 dan target menengah dalam renstra tahun 2022 sebesar 72. Sehingga persentase perbandingan IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) sudah mencapai 83,31%. Hal ini didukung dengan terfasilitasinya para pegawai dengan diklat online meskipun jumlah diklat yang tersedia masih terbatas akibat pandemic Covid-19.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) ini adalah masih tersedia dan terfasilitasinya pegawai PPS Bungus dalam melaksanakan Diklat atau pengembangan pegawai lain secara online. Selanjutnya kegagalan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketersediaan diklat secara offline berkurang. Selanjutnya, masih banyak pegawai PPS Bungus yang belum terbiasa dengan diklat ataupun bentuk pengembangan kompetensi secara online.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 54. Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran (Satuan Juta)

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
39.000.000	34.147.644	87,56

Realisasi anggaran triwulan IV 2020 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan anggaran 2020 telah mencapai 87,56% dengan efisiensi sebesar Rp. 4.852.356, yakni sebesar 12,44%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang Kinerja

Komponen kegiatan untuk menunjang IKU Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks) adalah adanya layanan SDM Aparatur Ditjen perikanan tangkap.

3. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP di KKP: (i) Perencanaan Kinerja; (III) Pengukuran Kinerja; (IV) Pelaporan Kinerja; (iv) Evaluasi Kinerja; (v) Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Penilaian SAKIP Dihitung dari hasil penilaian Itjen KP atas implementasi SAKIP di PPS Bungus dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Target dan realisasi

Tabel 55. Target dan Realisasi IKU Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	85	93,53	110,03

Pada tabel 55 di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian IKU Nilai PMSAKIP PPS Bungus sebesar 110,03%. Capaian ini dipengaruhi dengan terpenuhinya dokumen SAKIP PPS Bungus.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode yang sama

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	-	85	-	93,53	-

Capaian pada Tahun 2019 dan capaian Tahun 2020 tidak bisa dibandingkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBPN Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	93,53	85	110,04

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP PPS Bungus jika dibandingkan dengan Renstra persentasenya sebesar 110,04%. Disebabkan telah terpenuhinya dan semakin baik penerapan SAKIP di PPS Bungus.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Telah ditandatangani Perjanjian Kinerja yang berisi target indikator kinerja dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut. Dimana capaian kinerja tahunan dituangkan dalam Laporan Kinerja tahunan 2020.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 58. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
37.130.000	31.750.200	85,51

Realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar 85,51% dengan nilai efisiensi IKU ini adalah sebesar 5.379.800 atau 14,49%.

g. Analisa Program /kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

4. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pencapaian Indikator Kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun pengelompokan hasil penilaian dan cara penghitungannya sebagai berikut :

- Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Target Revisi DIPA}}{\Sigma \text{Revisi DIPA}} \right)$$

- Halaman III DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} \left\| \frac{((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA}))}{(\text{Perencanaan Hal II DIPA})} \right\|$$

- Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

d. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPS, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPS, dengan rumusan sebagai berikut:

f. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

g. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap

$$\left(\frac{\Sigma \text{Realisasi Anggaran}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk Triwulan I sebesar 15%, Triwulan IV 40%, Triwulan IV sebesar 60% dan Triwulan IV sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

h. Retur SP2D, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D yang terbit, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Retur SP2D}}{\Sigma \text{SP2D}} \right) \times 100$$

- i. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPS terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPS, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{ data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- j. Pengembalian SPM, Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:
- k. Dispensasi Penyampaian SPM, Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap

$$\left(\frac{\Sigma \text{ SPM salah}}{\Sigma \text{ Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

sseluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{ Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Pagu Minus}}{\Sigma \text{ Pagu}} \right) \times 100$$

- l. Pagu Minus, Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya, dengan rumusan sebagai berikut:

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi dua belas komponen yang terdapat pada Monev PA pada Aplikasi OM-SPAN.

a. Target dan realisasi

Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Nilai)	Persentase dari Target Triwulan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	88	99,34	112,88

Pada tabel terlibat bahwa persentase capaian IKU ini mencapai 112,88%. Tercapainya target ini tentu tak lepas dari komitmen semua pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada Rencana Operasional Kerja (ROK) tahun 2020.

b. Perbandingan dengan Tahun 2019 pada periode yang sama

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2019	2020	2019	2020	
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	88	-	99,34	-

IKU Nilai IKPA ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ini merupakan IKU baru di tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Capaian Nilai IKPA Tahun 2020 dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Persentase perbandingan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	99,34	89	111,61

Jika dibandingkan capaian tahun 2020 dengan target menengah 2022, diperoleh persentase perbandingan sebesar 111,61%. Tercapainya target ini tentu tak lepas dari komitmen semua pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada Rencana Operasional Kerja (ROK) tahun 2020.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus Tahun 2020 adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan

Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari retur SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

f. Analisa Efisiensi penggunaan Anggaran

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi terhadap Anggaran (%)
48.000.000	47.660.140	99,29

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IKU nilai IKPA di PPS Bungus sebesar 99,29% dengan efisiensi sebesar 0,71%, yakni sebesar Rp. 339.860,-.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah penyusunan RKAKL dan Kegiatan SIMAK dan SAIBA (Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Administrasi Keuangan).

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan hasil Revisi DIPA ke III Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.750.150.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2020 nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2020 Tanggal 12 November 2019, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Realisasi anggaran sampai dengan pada Triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar Rp.12.106.817.973,- atau sebesar 97,73% (persen) dari pagu sebesar Rp. 12.388.011.000,-.

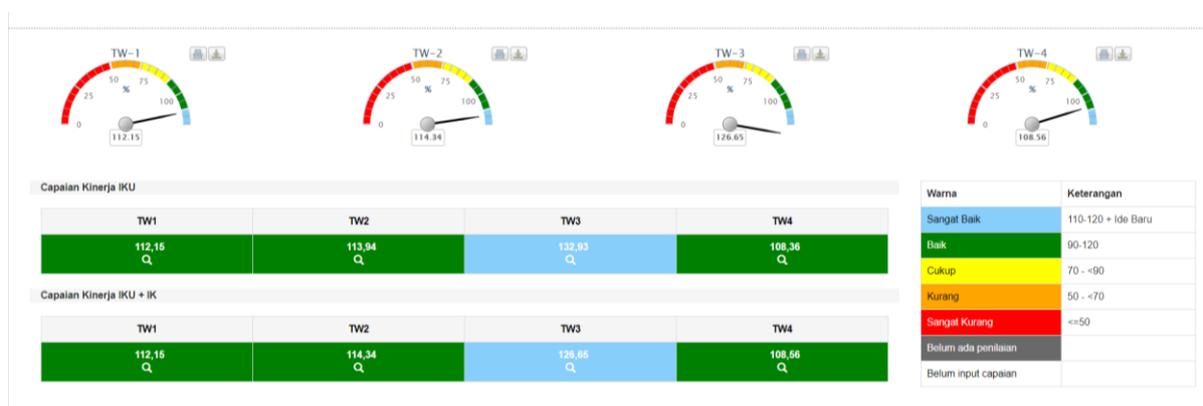
Tabel 63. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan s.d Triwulan IV

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran 2020 (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu (%)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		12.388.011.000,-	12.106.817.973,-	97,73
1	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	37.000.000,-	36.306.000,-	98,12
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.115.000.000,-	1.074.330.739,-	96,35
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	34.000.000,-	32.815.800,-	96,51
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	263.476.000,-	258.774.310,-	98,21
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	10.938.535.000,-	10.704.591.124,-	97,86

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus selama tahun 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus sebesar 108,56 persen Capaian Kinerja IKU dan IK pada Semester IV Tahun 2020.



Tabel 64. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan IV Tahun 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, semua Indikator Kinerja yang ditetapkan telah mencapai nilai/angka yang **Baik**.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan capaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab 3, adalah hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu Indikator Kinerja Nilai IP ASN dimana ditahun berikutnya pps bungus akan menambah keikutsertaan pegawai PPS Bungus dalam mengikuti diklat atau seminar-seminar serta mengusulkan pegawai untuk mengikuti ijin belajar dan tugas belajar agar bisa meningkatkan IP ASN dari sisi Kualifikasi Pendidikan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPS Bungus secara utuh. Namun demikian,

disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2020 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan- perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator- indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2020 ini dapat menjadi referensi yang *representative* serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPS Bungus Tahun 2020 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPS Bungus pada tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA KINERJA PPS BUNGUS TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1	Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1 Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	50
CUSTOMER PERSPECTIVE			
2	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2 Nilai PNBPN Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6
3	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	3.500
		4 Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		5 Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		6 Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)	32
		7 Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		8 Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	100
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
4	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9 Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Unit)	120
5	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (Persen)	100
		11 Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (WPP)	1
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12 Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10

		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88

Lampiran 2 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Soma Somantri**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. Zulficar Mochtar**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zulficar Mochtar

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Soma Somantri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	50
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2	Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6
3.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Unit)	120
4.	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (Persen)	100
		5	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (WPP)	1
5.	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	3.500
		7	Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		8	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		9	Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)	32

		10	Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1
		11	Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72
		14	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88

Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
 Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp 11.750.150.000

Jakarta, 30 Juni 2020

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zulficar Mochtar

Pihak Pertama
 Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Soma Somantri

EVALUASI DAN REKOMENDASI LKJ TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target	Realisasi	% Capaian Tahunan	Evaluasi	Rekomendasi							
				TW IV	TW IV			Berlanjut	Tidak berlanjut	Digabung	Dihapus	Penjamaan indikator	Penambahan target		
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	50	50	50	100	PPS Bungus bekerja sama dengan debitur dalam pemberian kredit pada nelayan melalui KKNB yang sudah ditunjuk oleh PPS Bungus maupun perwakilan dari kreditur itu sendiri.						dalam kegiatan pengujian kredit, parameter yang perlu dilihat adalah jumlah yang mengajukan bukan jumlah yang menerima		
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6	250	263,55	171,30	Sampai dengan TW IV tahun 2020 realisasi PNBP sudah mencapai angka 171,30% ini menandakan realisasi penerimaan PNBP cukup tinggi di PPS Bungus hal ini disebabkan oleh penambahan fasilitas coldstorage hibah dari PDSPKP. Jumlah dari penerimaan di coldstorage sampai dengan TW IV lebih dari 1337 juta rupiah.							Dilakukan usulan penambahan target pada tahun berikutnya untuk menyesuaikan realisasi yang sudah ada di PPS Bungus.	
3	Sumber Daya Ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (unit)	120	30	643	535,833333	Keputusan kapal perikanan terhadap pendaftaran dan penginputan data logbook perikanan di PPS Bungus sangat tinggi. Ini dikarenakan peran aktif dari direktor SDI dalam melakukan sosialisasi akan pentingnya penerapan pengisian logbook kapal perikanan. Hal tersebut juga didukung oleh petugas kesyahbandaran dalam mendampingi aktivasi dan penginputan data logbook.	Penerapan logbook tetap dilanjutkan sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan sumber daya ikan yang berkelanjutan.						dilakukan penambahan target dari penerapan logbook penangkapan ikan dan memperluas cakupan area penerapannya menjadi tingkat satu provinsi.	
5	Produktivitas perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang beroperasi (WPP)	1	-	1	100	Pemotongan anggaran yang terjadi di kegiatan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mengakibatkan beberapa kegiatan menjadi tidak terlaksana. Namun kegiatan pertemuan digantikan menjadi secara daring yang mempergunakan koordinator eksekutif dengan POKJA di pusat.	Pengelolaan WPPNRI merupakan salah satu tugas pokok DPT dalam memenuhi ketersediaan alokasi SDI di WPPNRI 572							
		Jumlah produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (ton)	3.500	950		0	Hasil produksi perikanan di PPS Bungus mengalami tren positif dimana realisasi hasil penangkapan masih dalam progres perencanaan. Kondisi pandemi yang dialami nelayan PPS Bungus sedikit mempengaruhi hasil tangkapan dikarenakan pabrik pengolah ikan menutup export sementara.	Indikator produksi perikanan tangkap harus tetap dilakukan sebagai indikator keberhasilan dan operasionalisasi pelabuhan perikanan.							
		Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	-	1	100	Pemotongan anggaran tahun 2020 salah satunya adalah pemotongan anggaran untuk kegiatan pengembangan pelabuhan. Namun, kegiatan perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun 2020.	Program pengembangan fasilitas PPS Bungus dilanjutkan pada tahun 2021 dengan alokasi yang sama dengan tahun 2020 yang mana perencanaannya masih menggunakan perencanaan 2020							
		Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	75	75	82,16	109,5466667	Nilai Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) menjadi dasar penilaian indikator tingkat operasional pelabuhan perikanan. Indikator di dalam penilaian PIPP tersebut berupa tingkat operasionalisasi pelabuhan perikanan.	Indikator tingkat operasional pelabuhan perikanan menjadi salah satu tolak ukur operasionalisasi pelabuhan perikanan. Butir-butir kegiatan dalam penilaian tersebut perlu dievaluasi lagi supaya lebih memberikan nilai yang objektif.							
		Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	32	0	6	18,75	Indikator ini adalah bentuk perhatian DIPT terhadap nelayan untuk melindungi nelayan dalam melaksanakan kegiatan di laut berupa perjanjian kerja laut, sertifikat awak kapal, sertifikat penangan ikan yang baik dan asuransi nelayan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan	Perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru serta update data kegiatan						Diharapkan semakin banyak jumlah nelayan tersertifikasi dan terlindungi maka semakin menguntungkan nelayan	
		Pemesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (lokasi)	1	1	1	100	PPS Bungus bekerjasama dengan KSOP untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemberian SKK 60 mil kepada nelayan PPS Bungus.	Masih banyak nelayan di PPS Bungus yang belum memiliki keahlian SKK 60 mil sehingga kurang berkompeten dalam menggunakan kapal lebih dari 30 QT							
		Persentase penyampaian informasi perizinan pusat-daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	100	100	100	Meningkatkan sinergitas antara dinas kelautan dan perikanan sumber, pemilik kapal, dan direktorat perizinan dalam rangka penyampaian informasi perizinan pusat-daerah PPS Bungus	Pentingnya penerbitan surat izin usaha perikanan mengharuskan informasi terkait perizinan dapat ditingkatkan							
		Nilai capaian pembangunan zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,10	45,10	45,10	100	penemuan dokumen WBK PPS Bungus yang sesuai dan tepat waktu untuk digunakan sebagai pedoman penilaian WBK								PPS Bungus akan dinilai WBK pada tahun 2021 sehingga perlu ditingkatkan target penilaiannya

6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (indeks)	72	72	59,99	83,31944444	Perlu peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis maupun non teknis untuk menambah kapabilitas pegawai menjadi lebih baik.	Peningkatan kapabilitas pegawai sangat penting dikarenakan sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja satker					
		Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	85	85	93,53	110,0352941	Meningkarkan kesesuaian antara indikator penilaian yang ada di LKE dengan dokumen yang dipenuhi	Menambahkan jumlah tim penyusunan SAKIP agar dokumen yang harus dipenuhi dapat dikumpulkan tepat waktu.					
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88	88	99,34	112,8863636	Capaian Nilai IKPA berikut menunjukkan keberhasilan PPS Bungus dalam memenuhi kesesuaian perencanaan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dimana setiap komponen memberikan kontribusi terhadap nilai akhir indikator pelaksanaan anggaran.	Target nilai IKPA merupakan indikator yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terhadap setiap satker untuk menilai kinerja dari segi anggaran.					